

FAKTOR DETERMINAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Faizal Soltan Abdul Akbar¹; Novi Dirgantari²; Sri Wahyuni³;
Hardiyanto Wibowo⁴

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto^{1,2,3,4}
Email : faisalsultanabdulakbar@gmail.com¹; novidirgantari@ymail.com²;
yuni1070@gmail.com³; hardiyantowibowo2d@gmail.com⁴

ABSTRAK

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang memiliki peranan mendasar dalam penyelenggaraan negara. Pemerintahan desa diharapkan dapat mengelola urusan pemerintahan umum dan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor determinan indeks desa membangun yang meliputi pengaruh dana desa, penggunaan dana infrastruktur, dan penggunaan dana pemberdayaan di desa-desa Kecamatan Kemangkon. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, Kantor Kecamatan Kemangkon, dan Balai Desa yang ada di Kecamatan Kemangkon, dengan menggunakan metode sensus. Alat analisis yang digunakan penelitian ini yaitu SEM-PLS. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa, Dana Infrastruktur dan Dana Pemberdayaan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun.

Kata kunci : Dana Desa; Indeks Desa Membangun; Penggunaan Dana Infrastruktur; Penggunaan dana Pemberdayaan

ABSTRACT

The village is the smallest administrative unit that plays a fundamental role in the functioning of the state. Village governance is expected to manage general governmental affairs and provide services to the community according to the needs of the village. The purpose of this research is to examine the determinants of the Village Development Index, which include the influence of village funds, the use of infrastructure funds, and the use of empowerment funds in the villages of the Kemangkon District. This research employs a quantitative approach, using secondary data obtained from the Office of Community and Village Empowerment of Purbalingga Regency, the Kemangkon District Office, and Village Halls in Kemangkon District, using the census method. The analytical tool used in this research is SEM-PLS. The results of the analysis show that Village Funds, Infrastructure Funds, and Community Empowerment Funds have no effect on the Village Development Index.

Keywords : Village Funds; Village Development Index; Infrastructure Fund Usage; Empowerment Fund Usage

PENDAHULUAN

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang memiliki peranan mendasar dalam penyelenggaraan negara. Pemerintahan desa diharapkan dapat mengelola urusan pemerintahan umum serta memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap tujuan akhir, yaitu

tercapainya desa yang mandiri. Dengan kata lain, kemampuan desa dalam membentuk pemerintahan desa yang efektif dan efisien sangat berkaitan dengan kemandirian desa tersebut.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2020), menyatakan bahwa program dana desa mendukung pelaksanaan pembangunan yang merata serta berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat. Program ini juga mendorong peningkatan pelayanan publik di desa, kemajuan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengurangan tingkat kemiskinan.

Pada daerah-daerah di Indonesia, tidak semua desa mampu meningkatkan skor Indeks Desa Membangun yang dimiliki, meskipun dukungan dana desa telah dikucurkan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena keberadaan dana desa juga menimbulkan masalah baru, dimana banyak masyarakat khawatir tentang pengelolaannya. Kekhawatiran ini terikat dengan kualitas sumber daya manusia perangkat desa yang masih dianggap rendah, serta kurangnya sikap kritis masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), sehingga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak bisa optimal. Contohnya, pada penelitian Halim & Taryani (2023) menggunakan data dana desa dari tahun 2017 hingga 2021 serta indeks desa membangun untuk periode 2020 hingga 2022 di 3.026 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa presentase penyaluran dana desa tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap indeks desa membangun.

Salah satu daerah di Indonesia dalam lingkup kecil yang menghadapi masalah ketidakmampuan dana desa untuk mendukung peningkatan indeks desa membangun adalah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dimana Kabupaten Purbalingga ini memiliki 18 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 224 desa. Diantara beberapa kecamatan tersebut, Kecamatan Kemangkon adalah kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Purbalingga yang terdapat 19 desa. Kecamatan ini memiliki karakteristik sebagai wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Desa Kecamatan Kemangkon juga merupakan desa pinggir di Kabupaten Purbalingga yang masih memiliki permasalahan seperti masih memiliki satu desa dengan status desa tertinggal ditahun 2019 dan 2020, jalan infrastruktur masih rusak, jembatan-jembatan yang belum memadai, dan salah satu kecamatan yang memiliki desa

terbanyak. Di tengah tantangan ini, penting untuk mengeksplorasi potensi dan strategi yang dapat diimplementasikan agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal, serta mendorong antara kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dana desa yang dialokasikan ke desa-desa di Kecamatan Kemangkon dikelola dengan baik oleh pemerintah desa dan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan infrastruktur serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang telah dirancang. Tujuan dari penggunaan dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Berdasarkan tabel 1 tersebut, terlihat bahwa realisasi penerimaan dana desa di kecamatan Kemangkon rerata mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021. Selanjutnya ditahun 2022, penerimaan dana desa kembali menurun, dan penurunan ini berlanjut pada tahun 2023. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna dana desa, di mana sebagian dari anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dari sisi IDM, dari data tahun 2019 sampai 2023, didapatkan hasil masih terdapat ketidakmerataan capaian IDM, meskipun dana desa, dana infrastruktur dan dana pemberdayaan sudah dialokasikan meningkat.

Padahal secara teoritis, seharusnya peningkatan anggaran dana desa beserta pengalokasian dana infrastruktur dan pemberdayaan, harus dapat memberi dampak positif Indeks Desa Membangun sebagai panduan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi dalam pembangunan (Hasugian, Hutahaean, Sinaga, Sriadhi, & Silaban (2020) serta Iftitah & Wibowo (2022). Dengan demikian, tercapainya kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian masyarakat desa akan menjadi lebih mudah dicapai dan tepat sasaran. Dampak ini menyoroti pentingnya IDM sebagai alat yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Banyak penelitian telah dilakukan terkait dana desa, dengan menggunakan variabel dana infrastruktur, dana pemberdayaan, dan indeks desa membangun. Hal tersebut dilakukan oleh Yulitasari & Tyas (2020) yang meneliti Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dana desa di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 14,7%, yang diikuti dengan peningkatan status desa secara agregat. Namun, hasil analisis regresi

mengungkapkan bahwa perubahan dalam jumlah dana desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan status desa di provinsi tersebut.

Kurniawan & Rauf (2021) memperoleh hasil dana desa berpengaruh terhadap penurunan kebutuhan infrastruktur dasar di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan desa, yang menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di desa. Sementara itu, Tambunan, Sihombing, & Harahap (2020) memperoleh hasil bahwa dana desa memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun. Namun, karena banyak aspek dan indikator yang mendukung indeks tersebut, dana desa tidak dapat dianggarkan untuk semua aspek, sehingga perangkat desa dan masyarakat harus menetapkan prioritas.

Penelitian lain menunjukkan bahwa dana desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lowongan kerja dan perbaikan infrastruktur sebagaimana dinyatakan oleh Atmojo, Fridayani, Kasiwi, & Pratama (2017), Tangkumahat, Panelewen, & Mirah (2017), Sofianto (2017), Qhamariyah & Zuhriyati (2019), Faisal Akbar, Yunita, & Yanuar (2020), Gani, Gani, & Arief (2020), serta Azwardi & Sukanto (2014). Keberhasilan pengelolaan dana desa didukung oleh partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat, seperti yang diutarakan oleh Daraba (2017), Aziz (2016), Putra (2013), serta Arifa (2019).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rezkia & Yunani (2023) yaitu, terdapat pada lokasi penelitian, rentang waktu penelitian, populasi penelitian, dan variabel yang digunakannya. Penelitian Rezkia & Yunani (2023) fokus pada dampak antara Dana Desa dan pembangunan infrastruktur terhadap IDM di Kecamatan Barabai dengan rentang waktu 2018-2021. Sebaliknya, penelitian ini dilakukan di 19 desa di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan periode waktu 2019-2023. Penelitian ini menggunakan 57 data yang diambil secara keseluruhan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari data yang telah ada serta dipublikasikan oleh berbagai lembaga seperti Dispermades Purbalingga, Kantor Kecamatan Kemangkon, dan Balai Desa yang ada di kecamatan Kemangkon.

Penelitian ini berupaya untuk; 1. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh positif dari dana desa terhadap indeks desa membangun di desa-desa di kecamatan Kemangkon, 2. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh positif dari penggunaan

dana infrastruktur terhadap indeks desa membangun di desa-desa di kecamatan Kemangkon, dan 3. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh positif dari penggunaan dana pemberdayaan terhadap indeks desa membangun di desa-desa di kecamatan Kemangkon.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam teori stewardship menurut Donaldson & Davis (1991), hubungan antara pihak *principal* (masyarakat) dan *steward* (pemerintah desa) digambarkan dengan menunjukkan bahwa keduanya cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Teori ini berpendapat bahwa kepentingan rakyat dapat dioptimalkan dengan membagi wewenang, hak, dan kewajiban kepada manajemen atau *steward* menurut Sari & Abdullah (2017). Sebagai *steward*, pemerintah desa diharapkan menyediakan data keuangan dan berfungsi sebagai *principal* dalam mengevaluasi akuntabilitas serta pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Teori *stewardship* menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat dipercaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan memberikan layanan yang bermanfaat. Dengan demikian, teori *stewardship* menggarisbawahi bahwa pemerintah desa lebih memprioritaskan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi, guna mencapai kesuksesan organisasi dan kepuasan masyarakat.

Dalam penggunaan dana desa, teori *stewardship* dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengelolaan dana desa, penggunaan dana infrastruktur dan penggunaan dana pemberdayaan, berpengaruh terhadap indeks desa membangun. Berdasarkan teori *stewardship*, perangkat desa yang berperan sebagai pengelola diharapkan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik masyarakat desa dengan memanfaatkan dana desa secara efektif serta efisien.

Penelitian Donaldson & Davis (1991) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan secara tepat dan transparan dapat memberikan kualitas hidup masyarakat desa serta mempercepat proses pembangunan di desa. Nadira, Yuliani, & Dewi (2020) mengemukakan bahwa pengalokasian dana untuk infrastruktur yang memadai dapat memperbaiki aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat desa, sehingga turut meningkatkan IDM. Selain itu, penggunaan dana pemberdayaan dalam dana desa dapat memperkuat kapasitas masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang pada

akhirnya mendukung pencapaian IDM.

Hipotesis

Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 (2016) tentang Desa, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi berbagai hal sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, dana desa akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan. Dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta diteruskan melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk mendukung pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah menyediakan alokasi dana desa dalam APBN, yang diambil dari anggaran belanja pemerintah, untuk memastikan implementasi program desa dapat dilaksanakan secara merata.

Studi yang dilakukan oleh Tambunan et al.,(2020) mengungkapkan bahwa dana desa memiliki dampak besar terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya dimensi dan indikator yang mempengaruhi indeks tersebut, sehingga pemerintah desa dan masyarakat perlu menentukan prioritas yang paling penting. Penelitian Rezkia & Yunani (2023) juga menemukan bahwa dana desa memberikan kontribusi positif serta signifikan terhadap Indeks Desa Membangun, baik dalam hal dampak parsial maupun keseluruhan. Dengan kata lain, setiap peningkatan dana desa akan mengarah pada peningkatan indeks desa membangun. Berdasarkan hasil penjelasan diatas, menurut penelitian sebelumnya dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan pada penelitian yaitu:

H1: Dana desa berpengaruh positif terhadap indeks desa membangun

Pengaruh Penggunaan Dana Infrastruktur Terhadap Indeks Desa Membangun

Menurut Mensah (2011) mengungkapkan bahwa infrastruktur seperti akses transportasi dan listrik memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga di Ghana, sedangkan infrastruktur air dipengaruhi oleh pengeluaran rumah tangga untuk fasilitas tersebut dan biaya peluang yang dihadapinya. Studi di Papua Nugini menunjukkan bahwa peningkatan kondisi jalan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga, dengan dampak yang lebih besar bagi rumah tangga kurang beruntung. Wiegand, Koomen, Pradhan, & Edmonds (2017) mengungkapkan bahwa rumah tangga yang lebih miskin dan berpendidikan rendah

cenderung lebih diuntungkan dengan adanya perbaikan jalan. Penelitian Djanggo, Tamberan, Tawakal, Puspa, & Unde (2019) di Merauke dan Boven Digoel juga menunjukkan bahwa infrastruktur jalan, transportasi laut, dan air memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi, infrastruktur ekonomi seperti pasar tradisional, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan, memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Annawang (2019), Marianti (2022), Sagala (2019), serta Nurhidayat (2023) juga menemukan bahwa pembangunan infrastruktur meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun hipotesis yang diajukan yaitu:

H2: Penggunaan dana infrastruktur berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun

Pengaruh Penggunaan Dana Pemberdayaan Dalam Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun

Belanja pemerintah desa juga berasal dari dana desa. Permendagri Nomor 37(2007) mengemukakan bahwa dana desa bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan salah satu jenis pendapatan transfer yang memiliki porsi penting dalam struktur APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap belanja pemerintah desa. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menunjukkan bahwa pada tahun 2018, sebagian besar penggunaan dana desa difokuskan pada belanja di bidang pemberdayaan pemerintahan desa.

Peneliti menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai ukuran efektivitas dana desa, yang digunakan sebagai modal BUMDes dalam pembangunan desa. IDM menilai kemajuan desa dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut penelitian Gani et al., (2020) & Nurhidayat (2023) penggunaan dana pemberdayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap komponen IDM. Berdasarkan hasil penjelasan diatas, menurut penelitian sebelumnya dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan pada penelitian yaitu:

H3: Penggunaan dana pemberdayaan dalam dana desa berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh melalui data sekunder dari berbagai lembaga, yaitu Dispermades Purbalingga, Kantor Kecamatan Kemangkon, serta Balai Desa di Kecamatan Kemangkon. Populasi penelitian mencakup 19 desa di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2023, menghasilkan total 95 data yang seluruhnya diambil semua untuk penelitian ini dengan menggunakan sensus. Teknik sampling yang diterapkan adalah sampling jenuh. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi: a.) Data realisasi dana desa per desa di kecamatan Kemangkon dari tahun 2019 hingga 2023, b.) Data realisasi penggunaan dana infrastruktur per desa di kecamatan Kemangkon dari tahun 2019 hingga 2023, c.) Data realisasi penggunaan dana pemberdayaan per desa di kecamatan Kemangkon dari tahun 2019 hingga 2023, dan d.) Data Indeks Desa Membangun per desa di kecamatan Kemangkon dari tahun 2019 hingga 2023.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa membangun adalah instrumen yang digunakan untuk menilai perkembangan dan kemajuan desa-desa di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 (2016) tentang desa, IDM bertujuan untuk memetakan kondisi desa dengan mengevaluasi tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan ekologi. Diukur dengan satuan Skor dengan rumus:

$$IDM = 1/3(IS+IEK+IL)$$

Keterangan:

- IDM : Indeks Desa Membangun
- IS : Indeks Sosial
- IEK : Indeks Ekonomi
- IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)

Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 (2016) mengenai Desa, dana desa adalah alokasi anggaran yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Diukur dengan satuan Rupiah dengan rumus : Dana Desa = Alokasi Dasar+Alokasi Formula

Penggunaan dana Infrastruktur dalam dana desa

Penggunaan dana infrastruktur dalam dana desa berkaitan dengan penyaluran dan pemanfaatan dana yang diberikan kepada desa untuk keperluan pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa. Infrastruktur desa mencakup fasilitas fisik seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, dan elemen lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Diukur dengan satuan Rupiah.

Penggunaan dana Pemberdayaan dalam dana desa

Penggunaan dana pemberdayaan dalam konteks dana desa adalah alokasi dan pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk kegiatan yang mendukung pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa. Ini meliputi berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan, keterampilan, serta partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa. Diukur dengan satuan Rupiah dengan rumus:

Dana Pemberdayaan = Total Dana Pemberdayaan/Total Dana Desa x 100%

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif tentang variabel dana desa, penggunaan dana pemberdayaan, penggunaan dana infrastruktur, dan indeks desa membangun (IDM). Berdasarkan tabel 2, data yang berdistribusi normal akan menunjukkan mean yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi. Dalam tabel tersebut variabel Dana Desa, Penggunaan Dana Pemberdayaan dalam dana desa, Penggunaan Dana Infrastruktur dalam dana desa, dan Indeks Desa Membangun semuanya memiliki nilai mean yang melebihi standar deviasi (Mean > Std. Dev.). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan siap untuk dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Berikut adalah pengujian yang dilakukan outer model:

Convergent Validity

Convergent validity mengukur sejauh mana suatu konstruk memiliki korelasi tinggi dengan variabel laten lainnya. Menurut Hair, Ringle, & Sarstedt (2013), nilai

convergent validity dilihat dari loading factor pada variabel laten, di mana nilai $> 0,7$ dianggap ideal dan menunjukkan validitas indikator tersebut. Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel memiliki nilai korelasi di atas $0,7$, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Model Struktural (Inner Model)

Berikut adalah pengujian yang dilakukan inner model:

R-Square (R^2)

Menurut Chin (1998) nilai R^2 mengacu pada pengukuran akurasi prediksi dari struktural model. Konstruksi endogen, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), menunjukkan nilai R^2 sebesar $0,344$ sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3. Menurut Juliandi (2018), pada *R-Square* memiliki kriteria $0,75$; $0,50$; dan $0,25$ yang menggambarkan tingkat pengaruh model, yaitu besar, sedang, serta kecil. Dalam tabel 3, nilai R-Square untuk Indeks Desa Membangun tercatat sebesar $0,344$. Angka ini menunjukkan bahwa Indeks Desa Membangun sebesar $34,4\%$ dan sisanya $65,5\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. Maka dari itu, model R-Square ini tidak dipengaruhi karena R-Square Adjusted kurang dari $0,25$.

F-Square (F^2)

Nilai F^2 mencerminkan tingkat seberapa besar pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dalam model struktural. Menurut Chin (1998), jika nilai F^2 berada di atas $0,02$ tetapi kurang dari $0,15$ maka dikategorikan pengaruh kecil. Jika nilai F^2 berada diantara $0,15$ hingga $0,35$ maka pengaruhnya dianggap sedang atau moderat. Sementara itu, jika nilai F^2 melebihi $0,35$ maka dikategorikan pengaruh besar.

Berdasarkan tabel 4 F-Square, hasil $0,005$ mengungkapkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh kecil terhadap terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Penggunaan dana Infrastruktur terhadap Indeks Desa Membangun mengungkapkan hasil $0,272$ yang berarti bahwa Penggunaan dana Infrastruktur memiliki pengaruh yang sedang terhadap IDM. Penggunaan dana Pemberdayaan terhadap Indeks Desa Membangun mengungkapkan hasil $0,017$ yang berarti bahwa Penggunaan dana Pemberdayaan memiliki pengaruh kecil terhadap IDM.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian *path coefficient* yang terlihat bahwa dana desa, penggunaan dana infrastruktur, dan penggunaan dana pemberdayaan berpengaruh terhadap indeks desa membangun. Namun, secara statistik, tidak ditemukan pengaruh

yang signifikan antara dana desa, penggunaan dana infrastruktur, serta penggunaan dana pemberdayaan terhadap indeks desa membangun.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama mengemukakan bahwa Dana Desa tidak memiliki pengaruh statistik yang signifikan terhadap Indeks Desa Membangun, dengan P sebesar 0,78 yang jauh di atas 0,05 dan nilai t sebesar 0,279. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal ini disebabkan karena penyaluran dana yang tidak merata. Berdasarkan data yang diperoleh, data menunjukkan bahwa penyaluran dana desa bervariasi setiap tahun dan antar desa. Ketidakmerataan ini menyebabkan beberapa desa tidak mendapatkan dana yang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Ini juga karena setiap tahunnya penyaluran dana APBDes semakin kompleks. Alasan yang lain mungkin dana desa tidak digunakan secara efektif atau sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan IDM, pengelolaan dana yang kurang optimal dapat mempengaruhi ketidaksignifikan pengaruhnya terhadap IDM.

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa desa Gambarsari menerima realisasi anggaran dana desa sebesar Rp94.725.000 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, menurun menjadi Rp80.284.400, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp123.200.000. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp152.394.400. Namun, pada tahun 2023, dana desa yang diterima desa Gambarsari menurun kembali menjadi Rp96.594.000.

Desa Kalialang menerima realisasi anggaran dana desa sebesar Rp136.777.230 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, anggaran tersebut menurun menjadi Rp118.690.414. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp200.565.575, tetapi kembali menurun pada tahun 2022 menjadi Rp171.546.075, dan pada tahun 2023 menurun lagi menjadi Rp157.000.000.

Desa Kedungbenda menerima realisasi anggaran dana desa sebesar Rp69.188.650 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, anggaran ini menurun menjadi Rp54.687.218, dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi Rp52.277.050. Penurunan berlanjut pada tahun 2022 menjadi Rp25.000.000, dan pada tahun 2023 menjadi Rp23.895.000.

Desa Kedunglegok tidak menerima realisasi anggaran dana desa pada tahun 2019. Pada tahun 2020, desa ini mulai menerima sebesar Rp54.500.000, yang kemudian

meningkat menjadi Rp88.800.000 pada tahun 2021. Namun, anggaran tersebut menurun pada tahun 2022 menjadi Rp40.000.000, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi Rp31.052.500.

Desa Majasem menerima realisasi anggaran dana desa sebesar Rp38.000.000 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp52.470.000, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp53.490.000. Namun, pada tahun 2022, anggaran tersebut menurun menjadi Rp49.040.000, dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi Rp44.790.000.

Realisasi dana desa yang diterima oleh desa-desa sering kali tidak merata dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pagu yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat yang mempengaruhi besaran dana desa. Selain itu, mekanisme penyaluran dana desa juga bergantung pada kebijakan pemerintah pusat yang dapat berubah tiap tahun, sehingga prioritas penggunaan dana desa disesuaikan dengan program pembangunan desa. Akibatnya, ada desa yang menerima dana lebih besar di satu tahun dan lebih kecil di tahun berikutnya, tergantung pada evaluasi, kondisi desa, serta arahan dari pemerintahan pusat bahwasannya anggaran dana desa diarahkan kemana. Fluktuasi ini sering kali menimbulkan tantangan dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan teori *stewardship*, salah satu aparatur desa berpendapat bahwa pemimpin desa seharusnya menggunakan dana desa untuk kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan kolektif masyarakat. Namun, jika dana desa hanya difokuskan pada program peningkatan kapasitas aparatur tanpa menyentuh masyarakat, dampaknya terhadap IDM menjadi tidak signifikan. IDM mengukur berbagai aspek seperti kualitas hidup, ekonomi, dan keberdayaan masyarakat, sehingga penggunaan dana desa yang tidak langsung berkontribusi pada pembangunan masyarakat tidak akan meningkatkan IDM. Sesuai prinsip *stewardship*, dana desa seharusnya dikelola untuk program yang memberdayakan masyarakat dan berdampak pada pengembangan desa secara luas, bukan hanya untuk peningkatan internal aparatur.

Menurut Halim & Taryani (2023) tidak adanya pengaruh disebabkan oleh interpretasi penyaluran dana desa yang hanya sebatas diterimanya dana di rekening kas desa, tanpa memperhitungkan penggunaannya secara nyata oleh desa. Oleh karena itu, tingginya atau rendahnya presentase penyaluran dana belum dapat dijadikan indikator

untuk menjelaskan tinggi rendahnya IDM. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Yulitasari & Tyas (2020) serta Kalontong, Anggraeni, & Tiawon (2019) yang juga menemukan bahwa dana desa tidak berdampak terhadap IDM atau pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 (2016) tentang Desa, desa memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengurus kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan penelitian Rezkia & Yunani (2023) hal ini memungkinkan desa untuk memanfaatkan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, serta mengatasi berbagai tantangan.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua mengemukakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistik antara Penggunaan dana Infrastruktur dalam dana desa terhadap Indeks Desa Membangun, dengan nilai P sebesar 0,368 lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar 0,9. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini disebabkan karena penyaluran dana yang tidak merata. Berdasarkan data yang diperoleh, data menunjukkan bahwa penyaluran penggunaan dana infrastruktur bervariasi setiap tahun dan antar desa. Ketidakteraturan ini menyebabkan beberapa desa tidak mendapatkan dana yang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Ini juga karena setiap tahunnya penyaluran dana APBDes semakin kompleks. Alasan yang lain mungkin infrastruktur yang dibangun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa.

Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwasannya desa Kemangkon menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur sebesar Rp1.022.267.365 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp731.235.599, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp631.279.240, pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp244.505.868, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana infrastruktur di desa Kemangkon hanya sebesar Rp569.948.600.

Desa Muntang menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur sebesar Rp867.059.700 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp319.610.350, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp642.198.931, pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp266.195.300, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana infrastruktur di desa Muntang hanya sebesar Rp1.136.394.583.

Desa Panican menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur sebesar Rp1.105.324.100 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp982.943.650, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp742.005.000, pada tahun 2022 menghabiskan anggran sebesar Rp169.108.000, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana infrastruktur di desa Panican hanya sebesar Rp833.049.600.

Desa Pegandekan menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur sebesar Rp489.060.500 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp373.077.700, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp621.555.880, pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp486.406.176, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana infrastruktur di desa Pegandekan hanya sebesar Rp821.475.930.

Desa Pelumutan menghabiskan anggaran penggunaan dana infrastruktur sebesar Rp1.056.848.100 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp634.028.775, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp872.653.475, pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp521.617.000, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana infrastruktur di desa Pelumutan hanya sebesar Rp1.298.745.100.

Realisasi penggunaan dana infrastruktur dari pagu yang diterima oleh desa-desa sering kali tidak merata dan fluktuatif setiap tahunnya. Ketidakmerataan ini disebabkan karena perbedaan kapasitas administratif desa dalam menyusun dan mengajukan rencana anggaran, serta prioritas pembangunan yang bervariasi di setiap wilayah. Selain itu, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah mengenai dana tersebut juga berkontribusi pada naik-turunnya jumlah dana yang diterima oleh desa-desa. Fluktuasi tersebut berdampak pada pelaksanaan program pembangunan, di mana desa dengan anggaran yang menurun mengalami keterlambatan serta pengurangan kualitas proyek infrastruktur yang direncanakan, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang lebih baik dan alokasi yang lebih adil agar pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata.

Berdasarkan teori *stewardship*, salah satu aparat desa berpendapat bahwa pemimpin harus mengelola sumber daya, termasuk penggunaan dana infrastruktur, untuk kepentingan masyarakat luas dan tujuan pembangunan jangka panjang.

Penggunaan dana infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM, hal ini mencerminkan bahwa pengelolaannya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *stewardship*. IDM mencakup aspek-aspek seperti ekonomi, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, sehingga penggunaan dana infrastruktur yang efektif seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika dana infrastruktur tidak digunakan secara strategis untuk memberdayakan masyarakat atau meningkatkan akses ekonomi, efek positif terhadap IDM akan minim. Dalam konteks ini, pemimpin desa perlu memastikan bahwa penggunaan dana infrastruktur terintegrasi dengan program yang menyentuh masyarakat secara langsung, sehingga peran mereka sebagai *steward* yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kolektif dapat terwujud, dan pembangunan desa secara keseluruhan dapat lebih optimal.

Ini menunjukkan bahwa meskipun dana tersebut dialokasikan untuk upaya pembangunan infrastruktur, namun tidak secara langsung meningkatkan IDM. Selain faktor realisasi dana desa, keberhasilan pembangunan desa juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, dan sinergi antarprogram pembangunan. Oleh karena itu, meskipun dana desa telah digunakan, jika faktor-faktor lain tidak mendukung, peningkatan IDM mungkin tidak terjadi. Menurut Sutikno, Hanapi, & Idealis (2024) penggunaan dana infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan di Pulau Madura. Hal ini berdasarkan status Indeks Pembangunan Desa Pulau Madura yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan desa masih kurang memuaskan. Ini terbukti oleh fakta bahwa hanya sedikit desa di Pulau Madura yang memiliki status Desa Mandiri. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Adhayanto, Arianto, Winatawira, Suryadi, & Nurhasanah (2019a) serta Restuningdiah, Firmansyah, & Arzaq (2024).

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga juga mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara Penggunaan dana Pemberdayaan dalam dana desa terhadap Indeks Desa Membangun, dengan nilai P 0,691 dan nilai t sebesar 0,398. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini disebabkan karena penyaluran dana yang tidak merata. Berdasarkan data yang diperoleh, data menunjukkan bahwa penyaluran penggunaan dana pemberdayaan bervariasi setiap tahun dan antar desa.

Ketidakmerataan ini menyebabkan beberapa desa tidak mendapatkan dana yang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Ini juga karena setiap tahunnya penyaluran dana APBDes semakin kompleks. Alasan yang lain mungkin program pemberdayaan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya relevan atau tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan atau keterbatasan sumber daya lokal untuk mengimplementasikan program pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwasannya desa Bakulan menghabiskan anggaran penggunaan dana pemberdayaan sebesar Rp181.522.200 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp12.550.000, pada tahun 2021 desa Bakulan tidak menggunakan anggaran penggunaan dana pemberdayaan, pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp36.810.000, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana pemberdayaan di desa Bakulan hanya sebesar Rp33.700.000.

Desa Bokol menghabiskan anggaran penggunaan dana pemberdayaan sebesar Rp635.282.844 pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar Rp107.499.000, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp200.000.000, pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp137.132.500, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana pemberdayaan di desa Bokol hanya sebesar Rp108.086.000.

Desa Jetis menghabiskan anggaran penggunaan dana pemberdayaan sebesar Rp66.770.000 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp29.380.827, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp93.917.050, pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp205.686.594, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana pemberdayaan di desa Jetis hanya sebesar Rp44.867.906.

Desa Karangkemiri menghabiskan anggaran penggunaan dana pemberdayaan sebesar Rp152.251.000 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp35.225.500, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp80.140.500, pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp40.266.000, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana pemberdayaan di desa Karangkemiri hanya sebesar Rp202.713.000.

Desa Kedungbenda menghabiskan anggaran penggunaan dana pemberdayaan sebesar Rp53.585.000 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menghabiskan anggaran sebesar Rp43.445.000, pada tahun 2021 menghabiskan anggaran sebesar Rp32.080.000,

pada tahun 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp146.711.000, dan pada tahun 2023 anggaran penggunaan dana pemberdayaan di desa Kedungbenda hanya sebesar Rp60.384.000.

Realisasi penggunaan dana pemberdayaan dari pagu anggaran yang diterima oleh desa-desa tidak merata dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Karena hal ini disebabkan perbedaan kapasitas manajemen di setiap desa, perubahan prioritas pembangunan, serta adanya perubahan regulasi pemerintah terkait alokasi dana desa. Desa dengan sumber daya manusia dan infrastruktur yang lebih baik, lebih mampu menyerap dan mengelola dana tersebut secara optimal, sementara desa-desa dengan keterbatasan sumber daya mengalami kesulitan dalam merealisasikan anggaran yang ada. Selain itu, faktor administratif seperti keterlambatan pencairan dana, mempengaruhi naik-turunnya realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Akibatnya, ketidakmerataan ini menghambat tujuan pemberdayaan dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh desa.

Dalam konteks teori *stewardship*, salah satu aparatur desa berpendapat bahwa penggunaan dana pemberdayaan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Kemangkon belum sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan kolektif dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Prinsip *stewardship* menekankan bahwa pemimpin desa harus memastikan penggunaan dana pemberdayaan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jika dana pemberdayaan hanya difokuskan pada program yang tidak menyentuh masyarakat luas, seperti peningkatan kapasitas aparatur tanpa dampak nyata terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, atau infrastruktur, maka hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *stewardship*. Agar dana pemberdayaan dapat berkontribusi signifikan terhadap IDM, program-program harus lebih berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, ekonomi lokal, dan kemandirian desa, sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, terdapat satu desa mandiri di Kecamatan Kemangkon. Desa ini dianggap mandiri karena memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di atas 0,8155. Hal tersebut dicapai berkat keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan yang didukung oleh Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, dengan fokus pada ketahanan sosial, ketahanan lingkungan, serta ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

Akses pendidikan, kesehatan, dan permukiman yang baik di desa ini menjadi bukti kuat dari ketahanan sosial yang terjaga. Selain itu, Desa Panican, yang jarang terkena bencana alam seperti banjir, menunjukkan pengelolaan lingkungan yang baik, yang mencerminkan aspek ketahanan lingkungan. Perekonomian desa ini pun beragam, mencakup perdagangan, pertanian, peternakan, dan jasa, yang mendukung perputaran ekonomi desa, menjadikannya mandiri secara ekonomi. Berkat dukungan Dana Desa, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat, ketiga aspek ini berhasil diperkuat. Oleh karena itu, desa-desa lain perlu meningkatkan aspek-aspek tersebut agar dapat mencapai keseimbangan indeks komposit penunjang Indeks Desa Membangun dan menjadi desa mandiri.

Menurut Agustina, Supriadi, & Somp (2019) tujuan utama dari penggunaan dana pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Hal ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan desa, dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh Badan Usaha Desa (BUMDesa) dan kelompok usaha masyarakat desa, pengembangan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa, serta pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk mendampingi kelompok usaha masyarakat desa yang terlibat dalam program pemerintah. Namun, penggunaan dana pemberdayaan di Desa Tewah Pupuh, Kecamatan Benua Lima tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam pembangunan desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian Adhayanto, Arianto, Winatawira, Suryadi, & Nurhasanah (2019b) serta Sutikno et al.,(2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; Dana Desa tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap Indeks Desa Membangun, Penggunaan dana Infrastruktur dalam dana desa juga tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap Indeks Desa Membangun, dan Penggunaan dana Pemberdayaan dalam dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Hal ini disebabkan karena penyaluran dana yang tidak merata. Berdasarkan data yang diperoleh, data menunjukkan bahwa penyaluran dana desa, penggunaan dana infrastruktur, dan penggunaan dana pemberdayaan bervariasi setiap tahun dan antar desa. Ketidakmerataan ini menyebabkan beberapa desa tidak mendapatkan dana yang cukup

untuk membuat perubahan yang signifikan. Ini juga karena setiap tahunnya penyaluran dana APBDes semakin kompleks. Alasan yang lain mungkin dana desa tidak digunakan secara efektif atau sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan IDM, pengelolaan dana yang kurang optimal, seperti alokasi yang tidak tepat, dapat mempengaruhi ketidaksignifikan pengaruhnya terhadap IDM. Hal ini memberikan beberapa implikasi penting bagi pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan yang tepat untuk melakukan pengalokasian anggaran dana desa dan melakukan penetapan kebijakan prioritas penggunaan dana infrastruktur serta penggunaan dana pemberdayaan di desa kecamatan Kemangkon. Pertama, pemerintah perlu menilai kembali mekanisme pengalokasian dan penggunaan dana desa agar lebih efektif dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun. Kedua, penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sangat penting. Terakhir, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, yaitu wilayah penelitian yang sempit, hanya mencakup desa-desa di kecamatan Kemangkon. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan wilayah untuk memberikan gambaran yang lebih representatif, seperti memperluas area penelitian ke beberapa kecamatan atau bahkan kabupaten lain untuk membuat hasil penelitian lebih representatif. Selain itu, untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif terkait faktor determinan yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun, penelitian selanjutnya menambahkan variabel tambahan yang dapat mempengaruhi IDM. Saran penelitian selanjutnya yaitu; 1) menggunakan alternatif teori yang lain untuk menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu teori *governance* atau manajemen keuangan publik, serta teori pembangunan berkelanjutan, 2) menggabungkan dua metode kuantitatif dan kualitatif agar dapat menghasilkan hasil yang lebih relevan, serta 3) menambahkan data primer dari responden langsung atau masyarakat desa agar mengurangi keakuratan hasil, karena data sekunder tidak selalu mencerminkan penggunaan dana di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

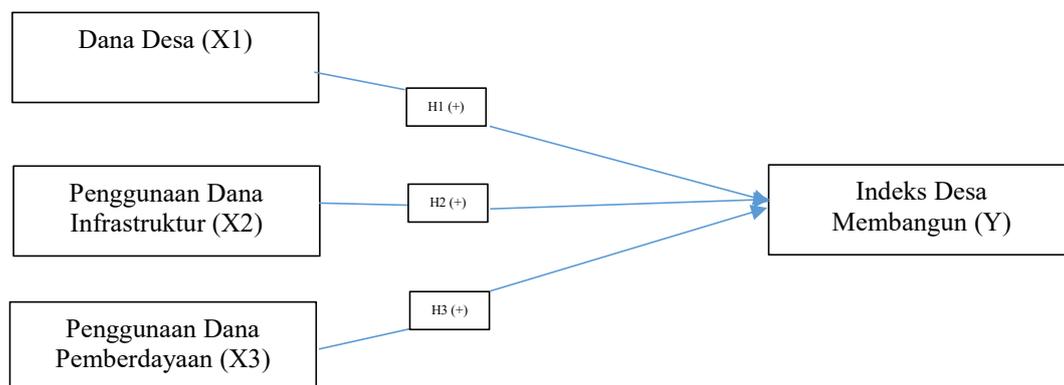
- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019a). The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 125–136. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.125-136>
- Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019b).

- The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja*, (21), 125–136. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.125-136>
- Agustina, R., Supriadi, H., & Sompia, A. T. (2019). Utilization of Village Funds in Community Empowerment Efforts (Study in Tewah Pupuh Village, Benua Lima District, East Barito Regency). *Saudi Journal of Economics and Finance*, 03(10), 445–452. <https://doi.org/10.36348/sjef.2019.v03i10.001>
- Annawang, L. K. (2019). Pengaruh pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat desa. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Arifa, I. N. (2019). Community Participation and Government Role in Using Village Funds in Dlingo Village. *Policy & Governance Review*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.30589/pgr.v3i2.129>
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO Sosial Politik Humaniora*, 5(1), 126–140. Diambil dari <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/423>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Effectiveness of Village Fund Allocation (ADD) and Poverty in South Sumatra. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. *Modern Methods for Business Research/Lawrence Erlbaum Associates*.
- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52–58. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2020). Buku Pintar Dana Desa. *Proposal SIMLITAMAS*, 8–37. Diambil dari https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL
- Djanggalo, R., Tamberan, Y. W., Tawakal, M. A., Puspa, L., & Unde, A. A. (2019). Analysis of infrastructure and community welfare in Merauke district and Boven Digoel district. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 12197. IOP Publishing.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian journal of Management*, 16(June 1991), 49–66. Diambil dari <http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>
- Faisal Akbar, M., Yunita, A., & Yanuar, D. (2020). Contribution Of Village Fund To Development and Social Empowerment And Coastal Community Economy In The Village Of West Kurau And Village Of Kurau In Central Bangka Regency. *Talent Development & Excellence*, 12.
- Gani, A. O. A., Gani, A., & Arief, M. (2020). Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 78–88.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Partial Least Squares Structural Equation Modeling: Rigorous Applications, Better Results and Higher Acceptance. *Long Range Planning*, 46(1–2), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001>
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap

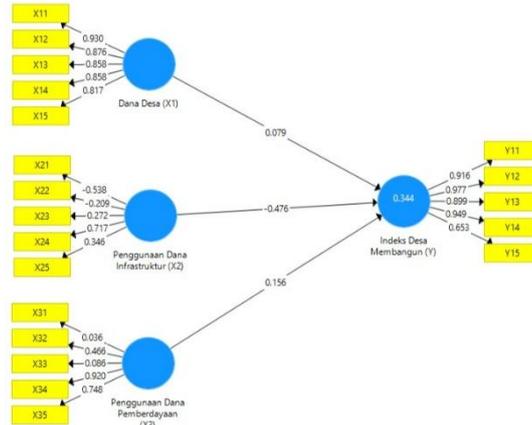
- indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71.
- Hasugian, P. M., Hutahaean, H. D., Sinaga, B., Sriadhi, & Silaban, S. (2020). Villages Status Classification Analysis Involving K-Means Algorithm to Support Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Work Programs. *Journal of Physics: Conference Series*, 1641(1), 0–8. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1641/1/012058>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap indeks desa membangun di kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36.
- Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (Sem-PLS) Dengan SmartPLS. *Modul Pelatihan*, 1(4), 1–6.
- Kalontong, E., Anggraeni, A., & Tiawon, H. (2019). Analysis of village fund management on regional development. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 12(2), 498–519.
- Kurniawan, A., & Rauf, R. (2021). Effectiveness of Using Village Funds In Improving Village Status Based on The Building Village Index (IDM) in Kuantan Singingi Regency. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 45–55.
- Mariato, M. (2022). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO.
- Mensah, E. (2011). *Infrastructure access and household welfare in rural ghana: the empirics of the nexus*.
- Nadira, P., Yuliani, R., & Dewi, A. (2020). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di kecamatan karau kuala kabupaten barito selatan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(2).
- Nurhidayati. (2023). Determinan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Sewindu Dana Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 139–156. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.349>
- Permendagri Nomor 37. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Indonesia, Kementerian Dalam Negeri*, 612y(235), 245.
- Putra, C. K. (2013). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang)*. Brawijaya University.
- Qhamariyah, S., & Zuhriyati, E. (2019). PUBLIC PERCEPTION OF OPTIMIZATION IN THE VILLAGE FUND ALLOCATION SUB DISTRICT Seyegan SLEMAN YEAR 2016. *Prosiding ICOGISS 2019*, 647–668.
- Restuningdiah, N., Firmansyah, R., & Arzaq, A. L. (2024). The Influence of Village Funds and Original Village Income on the Village Development Index in Balesari Village, Malang District. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 07(01), 83–87. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i1-10>
- Rezkia, L. S., & Yunani, A. (2023). Pengaruh Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Barabai. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 858. <https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11067>
- Sagala, Z. A. (2019). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya*

- Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34–49.
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 23–32.
- Sutikno, Hanapi, M. S., & Idealis, A. R. (2024). Do village funds have an influence on poverty alleviation in the village? *E3S Web of Conferences*, 499, 1–8. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449901008>
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 9(2), 439–446.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 335–342.
- Undang-Undang Nomor 6. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wiegand, M., Koomen, E., Pradhan, M. P., & Edmonds, C. (2017). *The impact of road development on household welfare in rural Papua New Guinea.*
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Konseptual



Gambar 2. Convergent Validity
Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024

Tabel 1. Realisasi Dana Desa & IDM di Kecamatan Kemangkong

No.	Nama Desa	Realisasi Dana Desa					IDM				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	BAKULAN	Rp 44,650,000.00	Rp 58,075,000.00	Rp 42,025,000.00	Rp 48,600,000.00	Rp 82,675,000.00	0.6552	0.674	0.674	0.674	0.7663
2	BOKOL	Rp 36,840,000.00	Rp 47,665,000.00	Rp 41,135,000.00	Rp 63,977,500.00	Rp 69,950,000.00	0.5997	0.6444	0.6444	0.6667	0.7835
3	GAMBARSAARI	Rp 94,725,000.00	Rp 80,284,400.00	Rp 123,200,000.00	Rp 152,394,400.00	Rp 96,594,000.00	0.7662	0.7622	0.7546	0.739	0.7981
4	JETIS	Rp 43,929,500.00	Rp 27,075,000.00	Rp 40,126,580.00	Rp 46,156,780.00	Rp 51,148,200.00	0.6479	0.6517	0.6668	0.6783	0.7411
5	KALIALANG	Rp 136,777,230.00	Rp 118,690,414.00	Rp 200,565,575.00	Rp 171,546,075.00	Rp 157,000,000.00	0.5563	0.59	0.6122	0.633	0.7365
6	KARANGKEMIRI	Rp 41,398,400.00	Rp 53,964,000.00	Rp 74,682,000.00	Rp 28,150,000.00	Rp 34,350,000.00	0.6889	0.6476	0.6235	0.6705	0.6667
7	KARANGTENGGAH	Rp 108,481,000.00	Rp 88,400,000.00	Rp 152,150,000.00	Rp 135,250,000.00	Rp 144,000,000.00	0.6013	0.6283	0.6283	0.6333	0.7759
8	KEDUNGBENDA	Rp 69,188,650.00	Rp 54,687,218.00	Rp 52,277,050.00	Rp 25,000,000.00	Rp 23,895,000.00	0.6999	0.6573	0.661	0.6819	0.7613
9	KEDUNGLEGOK	-	Rp 54,500,000.00	Rp 88,800,000.00	Rp 40,000,000.00	Rp 31,052,500.00	0.676	0.6516	0.6627	0.6627	0.7259
10	KEMANGKON	Rp 80,000,000.00	Rp 64,000,000.00	Rp 67,280,000.00	Rp 67,700,000.00	Rp 58,760,000.00	0.6368	0.6367	0.6502	0.6703	0.7256
11	MAJASEM	Rp 38,000,000.00	Rp 52,470,000.00	Rp 53,490,000.00	Rp 49,040,000.00	Rp 44,790,000.00	0.7179	0.7238	0.7222	0.7222	0.7387
12	MAJATENGAH	Rp 94,000,000.00	Rp 94,000,000.00	Rp 122,070,000.00	Rp 61,000,000.00	Rp 71,000,000.00	0.6926	0.6925	0.6738	0.7016	0.7035
13	MUNTANG	Rp 63,300,000.00	Rp 87,000,000.00	Rp 57,130,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp 50,000,000.00	0.7665	0.7402	0.654	0.7873	0.8002
14	PANICAN	Rp 154,500,000.00	Rp 142,000,000.00	Rp 153,214,975.00	Rp 187,071,500.00	Rp 144,200,000.00	0.8002	0.7817	0.7817	0.8084	0.8935
15	PEGANDEKAN	Rp 40,994,000.00	Rp 16,700,000.00	Rp 80,996,500.00	Rp 75,766,000.00	Rp 69,066,000.00	0.674	0.6848	0.6848	0.7	0.6943
16	PELUMUTAN	Rp 65,000,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp 44,700,000.00	Rp 64,500,000.00	Rp 64,700,000.00	0.6965	0.6965	0.6965	0.6965	0.8052
17	SENON	Rp 117,850,000.00	-	Rp 96,090,000.00	Rp 97,915,000.00	Rp 117,615,000.00	0.6645	0.7006	0.7006	0.7006	0.7006
18	SUMILIR	Rp 103,671,230.00	Rp 157,264,023.00	Rp 125,087,625.00	Rp 190,051,000.00	Rp 191,590,000.00	0.646	0.6498	0.6498	0.6741	0.7332
19	TOYAREKA	Rp 136,950,000.00	Rp 165,512,000.00	Rp 131,879,000.00	Rp 100,262,000.00	Rp 105,600,000.00	0.7146	0.7448	0.7579	0.7802	0.7614

Sumber: Dispermades Purbalingga Tahun 2024

Tabel 2. Tabel Deskriptif

Indicator	Mean	Std. Deviation
Y11	0,679	0,059
Y12	0,682	0,049
Y13	0,679	0,046
Y14	0,699	0,048
Y15	0,753	0,05
X11	18,108	0,476
X12	18,022	0,576
X13	18,215	0,497
X14	18,105	0,599
X15	18,102	0,563
X21	20,603	0,345
X22	20,16	0,542
X23	20,277	0,314

X24	19,96	0,626
X25	20,678	0,374
X31	18,906	0,932
X32	17,864	0,846
X33	18,196	1,371
X34	19,276	0,727
X35	18,825	0,738

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024

Tabel 3. Hasil Penyesuaian R² dan R Square

	R Square	R Square Adjusted
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,344	0,213

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024

Tabel 4. Result of F²

	Indeks Desa Membangun (IDM)
Dana Desa	0,005
Indeks Desa Membangun (IDM)	
Penggunaan dana Infrastruktur	0,272
Penggunaan dana Pemberdayaan	0,017

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024

Tabel 5. Path coefficient

	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
Dana Desa -> Indeks Desa Membangun	0,279	0,78	H1 Ditolak
Penggunaan dana Infrastruktur -> Indeks Desa Membangun	0,9	0,368	H2 Ditolak
Penggunaan dana Pemberdayaan -> Indeks Desa Membangun	0,398	0,691	H3 Ditolak

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS, diproses 2024